

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang berharap dalam beberapa tahun ke depan mampu menjadi negara yang maju. Berbagai langkah dan upaya harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi nasional haruslah mempunyai tujuan dalam memperluas ketersediaan dan pemerataan berbagai kebutuhan hidup, standar hidup, ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu langkah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah dalam mencapai hal tersebut dapat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam *website UMKMINDONESIA.ID*, data Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2022, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta. Peran UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia, yaitu memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar lebih dari 61,07% atau sekitar Rp8.573,89 Triliun setiap tahunnya. Selain itu, UMKM juga 97% total tenaga kerja Indonesia atau 117 juta orang.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang pada tahun 2021, tercatat sebanyak 11.787 pelaku usaha. Hal ini menunjukkan jumlah yang signifikan yang diharapkan mampu dalam memenuhi kebutuhan dan memperoleh pendapatan yang maksimal. Adanya Pandemi Covid-19 di akhir tahun 2019 menyebabkan pengaruh yang besar terhadap ekonomi, sosial, dan politik di dunia termasuk Indonesia. Hampir semua pelaku UMKM (terutama pelaku usaha mikro) mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perbankan. Kemampuan bertahan UMKM yang melakukan penjualan *online* lebih kuat dibandingkan UMKM yang hanya melakukan penjualan *offline*. Pacsa endemi *Coronavirus disease 2019* (Pandemi Covid 19) UMKM

mulai bangkit perlahan. Para pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan perkembangan pasar. Para Pelaku UMKM mulai belajar pada tata kelola dan tata cara penggunaan media sosial, seperti facebook, Instagram, *marketplace*, dan sejenisnya. Para pelaku UMKM saat ini sudah beradaptasi dengan eksositem digital, yang membawa pengaruh signifikan dalam income mereka. Apalagi saat terjadinya covid-19, semua kegiatan ekonomi berdampak termasuk UMKM. Selama pandemi covid-19, UMKM merupakan sektor yang paling mampu bertahan dibandingkan sektor lainnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional, selain karena UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditunjukkan mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja (Polandos, Engka, and Tolosang, 2019). Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Besarnya kontribusi UMKM terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia menuntut para pelaku UMKM untuk tetap berusaha dan selalu siap bersaing dengan UMKM lainnya. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat para pemangku epentingan UMKM untuk meningkatkan kinerja dan berdampak pada kelangsungan usaha. Untuk itu, diperlukan analisis bagi pelaku UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berlangsung lama dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi untuk kelangsungan hidup.

Kinerja merupakan kemampuan suatu usaha untuk memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu ukuran dibutuhkan dalam mengukur kinerja seperti tingkat kesuksesan atau hasil pencapaian dari sebuah usaha. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Nisfu, 2021). Kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode

tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Menurut Aribawa, (2016) bahwa dalam menganalisis kinerja UMKM, diperlukan suatu pendekatan yang berdasar pada beberapa asumsi, antara lain: (1) sumber daya yang terbatas menjadikan pengukuran kinerja sulit untuk dilakukan secara kuantitatif; (2) indikator keuangan yang kompleks dalam mengukur kinerja, berakibat pada kurang aktualnya kondisi perusahaan yang sebenarnya; (3) pengukuran kinerja pada umumnya kurang cocok jika diterapkan pada perusahaan selain perusahaan besar dengan manajemen terstruktur. Namun, terlepas dari asumsi-asumsi tersebut, pendapat yang diungkapkan oleh Rapih, (2015), pengukuran kinerja UMKM dapat dilakukan dengan beberapa indikator antara lain: (1) pertumbuhan keuntungan dalam nominal uang yang semakin mengalami peningkatan; (2) jumlah konsumen yang membeli produk semakin meningkat; (3) jumlah penjualan produk meningkat; (4) jumlah aset perusahaan baik aset tetap, maupun tidak tetap meningkat.

Namun dibalik perkembangan UMKM yang terus meningkat terjadi kendala yang selalu ditemui pada pelaku usaha UMKM, antara lain permasalahan atau kendala sumberdaya, pembiayaan, pengetahuan pengelolaan keuangan, teknologi serta permasalahan lainnya yang menghambat perkembangan pelaku UMKM (Suardana & Musmini, 2020). Pemerintah terus mendorong UMKM Indonesia agar mampu berkembang di pasar nasional dan menembus pasar internasional. Tidak sedikit UMKM yang tidak mampu mempertahankan kelangsungan usahanya, dikarenakan jiwa bersaing pelaku UMKM yang masih rendah terutama usaha mikro dan usaha kecil. Usaha mikro dan usaha kecil didominasi oleh pelaku usaha yang kurang memiliki pengetahuan terkait bisnis, sehingga diperlukan pendidikan bisnis agar mampu bersaing (Y. Rahayu, 2018).

Masalah sumber pembiayaan merupakan masalah klasik yang menjadi penghambat pertumbuhan UMKM yang tidak mendapat fasilitas pembiayaan dari sektor perbankan. Kurangnya sumber dana menjadikan UMKM tidak dapat mengembangkan inovasi untuk meningkatkan produksinya. Dalam [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), UU No 20 Tahun 2008, Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pelaku UMKM masih kekurangan informasi tentang pola pembiayaan untuk komoditas tertentu, di sisi lain, perbankan juga membutuhkan informasi tentang komoditas yang mungkin dibiayai. Dibandingkan dengan perusahaan besar, UMKM kurang dapat mendapatkan pinjaman dari bank. Sebagian besar UMKM mendapat pendanaan dari komunitas teman dan keluarga untuk memulai bisnisnya.

**Tabel 1. 1 Data Usaha Mikro di Kota Padang per Tahun 2023**

No.	KECAMATAN	USAHA MIKRO	JENIS USAHA					RTMP	
			KEMASAN	SAJI	RITEL	JASA	KERAJINAN	DTKS	NON DTKS
1	Padang Barat	3916	183	1693	1633	362	45	630	1621
2	Padang Selatan	3997	494	1627	1512	299	65	902	1035
3	Padang Timur	4353	373	1501	1873	493	113	958	1712
4	Padang Utara	2760	272	987	1120	266	115	495	228
5	Nanggalo	2258	301	759	852	284	62	545	571
6	Koto Tangah	6460	809	1832	2931	624	264	481	1411
7	Kuranji	6670	680	1999	2740	968	283	208	1809
8	Pauh	3160	255	916	1535	351	103	58	144
9	Lubuk Kilangan	2028	212	549	943	240	84	450	450
10	Lubuk Begalung	5264	535	1457	2517	585	170	1438	357
11	Bungus Teluk Kabung	2032	163	695	989	167	18	769	98
TOTAL KECAMATAN		42898	4277	14015	18645	4639	1322	6983	11764

*Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2023*

Kota Padang merupakan pusat UMKM terbesar di Sumatera Barat. Hal tersebut menjadi suatu perhatian khusus mengenai kinerja para pelaku UMKM tersebut. Kecamatan Kuranji merupakan salah satu kecamatan di kota Padang yang memiliki banyak UMKM yang terdiri dari jenis usaha kemasan, usaha saji, ritel , jasa , dan kerajinan. Salah satu cara strategis untuk meningkatkan pendapatan perekonomian kecamatan Kuranji adalah dengan mendorong pertumbuhan UMKM. Untuk memajukan UMKM di kecamatan Kuranji, pelaku UMKM harus mampu meningkatkan daya saingnya dengan pelaku ekonomi lainnya, meningkatkan kualitas usahanya sendiri, dan dapat meningkatkan kinerja UMKM pula.

Namun dibalik perkembangan UMKM yang terus meningkat, tentu ada suatu permasalahan yang terjadi diantaranya permasalahan sumber daya, masalah pengelolaan keuangan, masalah teknologi dan permasalahan lain yang dapat menghambat kelangsungan UMKM tersebut. Banyak UMKM yang akhirnya harus tutup dikarenakan kalah saing akibat kurangnya pengetahuan dalam mengelola UMKM. Pelaku UMKM harus bisa dan memahami pengelolaan keuangan dan akuntabilitas demi meningkatkan kinerja UMKM untuk waktu lama. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, mengembangkan rencana dan strategi , serta mengalokasikan sumber daya keuangan yang terdiri dari modal dan pendapatan guna mencapai kemakmuran ekonomi dan taraf hidup yang lebih baik. Literasi keuangan merupakan kecakapan atau tingkat pemahaman individu ataupun masyarakat mengenai bagaimana mereka mengelola keuangannya secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian yang dihadapinya (Dwiyanti & Jati, 2019). Pengetahuan literasi keuangan tidak lepas dari pengetahuan keuangan. Kondisi dan latar belakang pelaku UMKM membuat tingkat literasi keuangan berbeda-beda. Literasi keuangan memiliki esensi yang lebih mendetail dibandingkan pengetahuan keuangan. Pemahaman secara mendetail dapat memberikan keputusan keuangan yang tepat (Kusuma dkk, 2022).

Literasi keuangan merupakan hal yang penting dan sangat dibutuhkan UMKM di Kecamatan Kuranji, karena dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi dapat membantu pelaku UMKM untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menyusun strategi keuangan, mengelola laporan keuangan, membuat perencanaan bisnis, dan keputusan investasi. Seseorang yang memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi akan mendapatkan beberapa keuntungan diantaranya yaitu dapat mengambil keputusan keuangan untuk masa depan dengan baik, memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan, memiliki investasi di pasar modal, mampu meminimalisir permasalahan keuangan yang terjadi untuk meningkatkan kesejahteraan (Akhmad Darmawan, Annisa Sepriani, Fatmah Bagis, and Dwi Vina Rahmawati, 2021) . Literasi keuangan sangat terkait dengan perilaku, kebiasaan dan pengaruh dari faktor eksternal.

Literasi keuangan merupakan kecakapan atau tingkat pemahaman individu ataupun masyarakat mengenai bagaimana mereka mengelola keuangannya secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian yang dihadapinya. Dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan yang kuat dapat sangat berpengaruh pada kinerja UMKM. Pembiayaan dalam literasi keuangan merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan. Pemilik UMKM yang memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan cenderung mampu mengelola keuangan usaha mereka dengan lebih efisien. Mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait pembiayaan, investasi, dan perencanaan keuangan jangka panjang yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM mereka.

Selain literasi keuangan, permasalahan yang juga terjadi yaitu inklusi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (2017) berpendapat bahwa inklusi keuangan berarti akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan adalah

ketersediaan akses keuangan terhadap layanan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Joko Susilo, Yuneita Anisma, and Azhari Syofyan, 2022). Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2020) , inklusi keuangan didefinisikan sebagai semua orang yang berhak atas akses penuh dan layanan dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, bermanfaat dan terjangkau, dengan tetap menghormati martabat dan nilai individu. Dalam *website peraturan.bpk.go.id*, Permenko Perekonomian No 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan SNKI, indikator Inklusi Keuangan adalah ketersediaan/akses, penggunaan, kualitas, kebahagiaan. Inklusi keuangan merupakan bagian dari program literasi keuangan, terutama dalam konteks peningkatan kemampuan usaha kecil dan menengah dalam mengakses layanan keuangan dan mencapai dampak langsung melalui lembaga keuangan.

Inklusi keuangan merupakan upaya untuk mengecualikan atau menghilangkan segala hambatan yang menghalangi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Pembiayaan terhadap inklusi keuangan sangat penting untuk memastikan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, seperti rekening bank, pinjaman, dan asuransi, kepada sebagian besar masyarakat. Jadi dengan adanya inklusi keuangan yang membuat kinerja UMKM menjadi lebih baik yang mencakup akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan seperti pinjaman, tabungan, dan asuransi. Dengan akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan, UMKM memiliki kesempatan untuk mendapatkan modal, mengelola risiko, dan mengembangkan usaha mereka secara lebih efektif. Hal ini dapat memperluas peluang pertumbuhan dan memperbaiki stabilitas finansial UMKM.

Perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja UMKM yaitu dengan penggunaan *e-commerce*. *E-Commerce* adalah sistem untuk menjual, membeli, dan memasarkan produk elektronik. *E-commerce* dapat menjadi peluang besar untuk pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya serta memungkinkan UMKM melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global sehingga berpeluang menembus ekspor

(Karyati, 2019). Kehadiran *e-commerce* di Indonesia dapat mendukung dan mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia untuk dengan mudah memperkenalkan produk dan layanannya serta memperluas jangkauan penjualannya ke berbagai wilayah di Indonesia. Pelaku UMKM mendapatkan manfaat yang sangat besar dengan hadirnya *e-commerce*. Pasalnya, dengan sekali pelaku UMKM mendaftar *e-commerce* atau membuka toko, maka sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM karena sangat mudah mendapatkan produk untuk dijual. Toko online yang terdaftar di website *e-commerce* dapat diakses oleh seluruh pengguna *e-commerce* tanpa memandang asal usulnya hanya dengan mengetikkan nama produk di fungsi pencarian , dan pelaku UMKM dapat bersaing dengan perusahaan besar dan UMKM mempunyai kewajiban untuk berubah dan berinovasi untuk meningkatkan daya saingnya.

Penggunaan *e-commerce* dapat meliputi investasi dalam teknologi, pengembangan platform, pelatihan, serta kampanye pemasaran yang memperluas kesadaran dan kenyamanan pengguna terhadap transaksi online. Ini membantu mempercepat adopsi *e-commerce* dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Oleh sebab itu, minat menggunakan *e-commerce* memiliki dampak signifikan pada kinerja UMKM. Dengan mengadopsi platform *e-commerce*, UMKM dapat mencapai pasar yang lebih luas, meningkatkan visibilitas produk, dan memperluas jangkauan konsumen. Ini dapat menghasilkan peningkatan penjualan, memperbaiki rantai pasokan, dan memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dengan lebih baik. *E-commerce* juga dapat membantu UMKM dalam meningkatkan effisiensi operasional dan pengelolaan bisnis mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menguji pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, dan minat menggunakan *e-commerce* terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Kuranji. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis

maupun praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memperkaya kajian pengetahuan dan informasi tentang literasi keuangan, inklusi keuangan, minat menggunakan *e-commerce*, serta kinerja UMKM. Sedangkan manfaat praktis dalam penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM mereka. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil judul **Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Minat Menggunakan *E-commerce* Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Kuranji.**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Kuranji?
2. Apakah Inklusi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Kuranji?
3. Apakah Minat Menggunakan *E-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Kuranji?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh positif Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Kuranji.
- b. Untuk menguji pengaruh positif Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Kuranji.
- c. Untuk menguji pengaruh positif Minat Menggunakan *E-commerce* terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Kuranji.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menambah pengetahuan di bidang keuangan, khususnya mengenai pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan dan minat menggunakan *e-commerce* terhadap Kinerja UMKM.

### 2. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaku UMKM terutama yang berhubungan dengan literasi keuangan, inklusi keuangan dan minat menggunakan *e-commerce* agar dapat mendorong kegiatan usahanya.

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, informasi, dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan literasi keuangan, inklusi keuangan dan minat menggunakan *E-commerce* terhadap Kinerja UMKM.

## 1.5 Batasan Penelitian

Supaya penelitian ini dapat berfokus dan tidak meluas untuk menghindari kesalahan, sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka peneliti memiliki batasan penelitian ini yaitu :

- 1 Para pelaku UMKM di kecamatan Kuranji yang memiliki legalitas dan memiliki omset 10 juta ke atas.